

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertahanan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah, yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun antarnegara dan pastinya mempunyai dampak politis dan dampak terhadap fungsi pertahanan keamanan nasional.<sup>1</sup>

Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Oleh karena itu, *frontier* dapat disebut dengan istilah *foreland*, *borderland* ataupun *march*.

Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh

---

<sup>1</sup> (Muta'Ali, 2015)

serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. *Boundary* paling tepat di pakai apabila suatu negara di pandang sebagai unit spesial yang berdaulat.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan 10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Kawasan perbatasan laut tersebut mencakup 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki batas wilayah antar Negara yang sangat panjang baik batas laut maupun batas darat. Peran penting wilayah perbatasan terhadap kedaulatan Negara juga terkait dengan penduduknya karena masyarakat tersebut berpotensi positif ataupun negatif. Dari sisi positif, posisi masyarakat tersebut dapat digunakan sebagai penjaga kedaulatan Negara, terlebih jika kesejahteraan mereka dalam hal kebutuhan pokok serta kepentingan lain-lainnya terpenuhi dengan baik oleh Negara.

Tetapi jika sebaliknya, maka posisi mereka bisa berubah menjadi sebuah ancaman juga, bagi kedaulatan Negara terlebih jika kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi dengan baik yang menyebabkan mereka menjadi tergantung pada Negara tetangga. Ancaman ini tadilah yang bisa terjadi jika Negara lemah terhadap pengawasan dari berbagai aspek kehidupan baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

---

<sup>2</sup> (Hdiwijoyo, 2008)

<sup>3</sup> (Kep)

Menurut Departemen Pertahanan dan Dishidros (Dinas Hidrografi dan Oseanografi) TNI AL dari 17.504 pulau yang dimiliki oleh Indonesia terdapat 92 pulau kecil berada di posisi terluar, 67 pulau diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil terluar. Kawasan-kawasan perbatasan laut pada umumnya ditandai oleh pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau, hingga kini beberapa di antaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena adanya kecenderungan terjadinya berbagai permasalahan dengan negara tetangga. Sebagian besar daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang masih sangat terbatas.<sup>4</sup>

Dengan jumlah perbatasan yang banyak, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mensejahterkan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan terluar membuat pembangunannya kurang perhatian oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistis pada saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya.<sup>5</sup>

Kondisi perbatasan Indonesia yang memprihatinkan akan lebih jelas terlihat jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara lain yang lebih maju. Dari

---

<sup>4</sup> (2003).

<sup>5</sup> Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I, Perbatasan Negara: Problem dan Solusi.(Jakarta: DPD RI, 2011)hlm.8

tiga negara yang berbatasan dengan Indonesia, Malaysia dianggap lebih maju dalam mengelola kawasan perbatasan.<sup>6</sup>

Perbatasan harus dikelola secara baik dan berkelanjutan, karena selain berkaitan dengan penyelesaian berbagai sengketa Internasional juga karena daerah perbatasan memiliki fungsi yang sangat strategi seperti fungsi militer, ekonomi perdagangan, dan kedaulatan negara. Untuk mengelola keamanan kawasan perbatasan secara baik perlu dibedakan *Regime* pengelola perbatasan sehingga pola pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan masing-masing negara dapat menjamin kedaulatan dan hak berdaulat masing-masing<sup>7</sup>

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ke tiga di dunia, terletak di tengah kepulauan Indonesia dalam imajinasi orang-orang Eropa. Kalimantan bukan fokus utama yang menarik perhatian bangsa Eropa, tetapi bangsa Eropa tetap memiliki hubungan dagang di sana. Meskipun demikian, hubungan awal yang terjadi hanya dangkal saja. Kalimantan sering di gambarkan dalam konteks perjalanan yang amat panjang dalam usaha mencari penemuan atau riset terbaru.

Fokus yang utama adalah membuka atau membuka jalur perdagangan dengan negara-negara perairan muslim. Bagi bangsa Portugis, Spanyol, dan Italia pada abad ke-16, atau bahkan oleh bangsa Belanda dan Inggris pada abad ke-17, pelabuhan negara Islam ini pasti di anggap sangat mengesankan dan mutakhir.

Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara berada di Timur Laut Pulau Kalimantan, dan berbatasan langsung dengan (Fauzi, 2011) (Fauzi, 2011) negara

---

<sup>6</sup> (Fauzi, 2011)  
(Pengaturan Hukum dalam Penerapan menurut Hukum Internasional, 2017)

Malaysia. Yakni negara bagian Serawak dan Sabah. Kalimantan termasuk Provinsi termuda di Indonesia, yang merupakan pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu embel-embel Kalimantan Timur masih melekat sebagian di ingatan Masyarakat Utara. Keunikan Provinsi Kalimantan Utara adalah wilayahnya yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Selain menimbulkan permasalahan keadaan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia juga memberi keuntungan, terutama soal perdagangan. Kalimantan Utara dan Sabah saling menguntungkan.

Sebelum UU Nomor 20 Tahun 2002 diundangkan, Kalimantan Utara masih menyatu dengan Kalimantan Timur sehingga menjadi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Provinsi terluas di Kalimantan, Luas wilayah inilah yang menjadi salah satu pemecahan Kalimantan Timur menjadi dua Provinsi. Selain itu, potensi sumber daya alam yang melimpah di bagian Utara Pulau Kalimantan membuat pemerintah semakin yakin jika Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dapat memenuhi syarat APBD sebagai salah satu provinsi mandiri.

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Malinau. Kalimantan Utara kemudian di singkat menjadi Kaltara yang Ibukotanya berada di Tanjung Selor Kabupaten. Dari lima Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, terdapat 50 Kecamatan dan 479 Kelurahan/Desa.

Kalimantan Utara mencapai 75.467.70 km<sup>2</sup> dengan persebaran penduduk sebanyak 641.963 jiwa pada tahun 2015. Jumlah penduduk ini terbesar secara tidak

merata antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lainnya. Kota Tarakan memiliki jumlah penduduk terpadat, yakni 235.564 jiwa kemudian di susul Kabupaten Nunukan sebanyak 177.607 jiwa.

Pusat pemerintahan Kalimantan Utara berada di Tanjung Selor. Seperti Provinsi lain di Indonesia, Kalimantan juga menganut model kepemimpinan yang sama yakni dari gubernur ke bupati, camat, lurah atau desa. Meskipun demikian pendidikan terbesar berada di Kota Tarakan. Perguruan tertinggi di Kalimantan Utara, yakni Universitas Borneo berada di Kota Tarakan. Selain itu, beberapa perguruan tinggi swasta terdapat di Kabupaten Nunukan dan Bulungan.

Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah (Malaysia Timur) di sebelah Utara, dengan Kabupaten Bulungan dan Malinau di sebelah Selatan, di bagian Selatan dengan negara bagian Serawak (Malaysia Timur) dan di sebelah Timur dengan Laut Sulawessi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2016a:3).

Kabupaten Nunukan yang di resmikan sebagai daerah otonom pada tahun 1999 menempati area seluas 14.247,50 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini memiliki lebih dari 20 pulau besar dan kecil dengan luas berkisar antara 23.790 ha – 0,15 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan 2016a:5). Pulau terluas adalah Sebatik, diikuti oleh Nunukan, sebaliknya pulau tersempit adalah pulau Pelanduk.

Terdapat satu pulau yang berbatasan langsung dengan wilayah negara bagian Sabah Malaysia di wilayah provinsi Kalimantan Utara Indonesia, yakni

Pulau Sebatik.<sup>8</sup> Pulau Sebatik merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pulau Sebatik termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik, yaitu kecamatan paling timur di kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Kecamatan Sebatik terdiri dari empat desa, yaitu Tanjung Karang, Pancang, Sungai Nyamuk Tanjung Aru dan Setabu. Pulau ini secara umum beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,8 °C, suhu terendah 22,9 °C pada bulan Agustus dan tertinggi 33,0 °C pada bulan April. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena perbatasan langsung dengan negara tetangga. Program utama yang perlu dilakukan di Pulau Sebatik antara lain adalah pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata serta peningkatan hukum dan pengawasan keamanan.

Pulau Sebatik terdiri dari 5 Kecamatan dan 19 Desa yang kan siap menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru). Kecamatan Sebatik terdiri dari Desa Padaidi, Desa Sungai Manurung, Desa Tanjung Karang dan Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat terdiri dari Desa Setabu, Desa Binalawan, Desa Liang Bunyu dan Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari Desa Sungai Limau, Desa Maspul, Desa Bukit Harapan dan Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Utara terdiri dari Desa Seberang, Desa Lapri dan Desa Pancang, sedangkan Kecamatan Sebatik Timur terdiri dari Desa Tanjung Harapan, Desa Sungai Nyamuk, Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru.

Pulau Sebatik terbagi dua. Belahan utara seluas 187,23 km<sup>2</sup> merupakan wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia, sedangkan belahan selatan dengan luas

---

<sup>8</sup> (Saleh, 2010)

246,61 km<sup>2</sup> masuk ke wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari luas ini 375, 52 hektare di antaranya merupakan kawasan konservasi.

Masyarakat Pulau Sebatik lebih dominan berinteraksi dengan masyarakat negara tetangga (Tawau, Malaysia) dalam kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dalam keberlangsungan hidup. Masyarakat mendatangkan atau membeli langsung dari Tawau untuk di bawa Pulau Sebatik, sehingga kegiatan transaksi masyarakat menggunakan mata uang ringgit dan juga mata uang rupiah.

Berdasarkan penuturan salah seorang warga<sup>9</sup>, masyarakat Pulau Sebatik lebih memilih barang produksi Malaysia karena secara ekonomis harganya lebih murah dan mudah didapat. Biasanya, barang-barang produksi Indonesia didatangkan dari Tarakan dan Nunukan yang jaraknya lebih jauh dengan harga yang relatif lebih mahal akibat tingginya biaya transportasi pengiriman barang.

Seluruh hasil sumber daya alam yang dimiliki Pulau Sebatik diperdagangkan ke Tawau Sabah Malaysia, dengan alasan jarak tempuh yang relatif lebih dekat jika dibandingkan menuju ke daerah lain yang ada di Indonesia (Nunukan, Tarakan). Dan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Sebatik mendatangkan atau membeli dari negara tetangga (Tawau). Keterbatasan infrastuktur di pulau ini seperti sarana perhubungan, transportasi, komunikasi, penyediaan air bersih yang mengharuskan masyarakat Sebatik lebih dominan ke Tawau Malaysia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>9</sup> (Wawancara tanggal 2 Februari 2015, 2015)

Kegiatan transaksi masyarakat Pulau Sebatik menggunakan mata uang ringgit Malaysia tidak hanya pada saat betransaksi di pasar Tawau (Malaysia). Namun di pasar tradisional dan kios-kios yang ada di Pulau Sebatik juga menggunakan mata uang ringgit dalam kegiatan transaksi bahkan harga-harga barang yang ada di kios-kios Pulau Sebatik dipatok dalam nilai mata uang ringgit. Dikarenakan nilai mata uang ringgit lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah.

Sejak sekitar tahun 1970 Masyarakat Sebatik telah menggunakan mata uang ringgit dalam kegiatan transaksi jual-beli, dengan menggunakan fasilitas pasar memperbolehkan pertukaran mata uang asing untuk arus transaksi yang akan menyebabkan adanya arus uang dari satu negara lain. Hal tersebut berpengaruh bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan yang berada di sektor perdagangan.

Dengan kondisi ini tidak salah kalau kemudian masyarakat Sebatik mengantungkan hidup di Malaysia dan mereka lebih cenderung menggunakan ringgit Malaysia. Sekitar 50% masyarakat Sebatik menggunakan mata uang ringgit dari kurang lebih 35.000 jiwa sedangkan penggunaan mata uang rupiah sebagai alat tukar hanya sekitar 50% dari total peredaran uang.

Dalam proses penyimpanan atau menabung di bank yang ada di Pulau Sebatik masyarakat menggunakan mata uang rupiah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004, bahwa satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah (Rp.). Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah, maka setiap

perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang keadaan yang terjadi dalam proses kegiatan transaksi Pulau Sebatik tidak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, dimana masyarakat Sebatik lebih dominan menggunakan mata uang ringgit Malaysia dari pada mata uang rupiah Indonesia sebagai alat pembayaran.

Alasan penelitian ini yaitu karena Pulau Sebatik sebagai salah satu pintu masuk Indonesia atau beranda terdepan, yang seharusnya diperhatikan dikelola dan ditata secara optimal agar layak menjadi sebuah kota, namun pada kenyataannya Pulau Sebatik sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kota negara tetangga sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial di perbatasan. Adapun alasannya mengambil Pulau Sebatik adalah alasan geografis yaitu pulau tersebut secara langsung berbatasan dengan Tawau Sabah Malaysia.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Merujuk pada kajian fenomena di atas, maka ruang lingkup dari penelitian ini tidak akan lepas dari judul yang penulis ajukan. Identifikasi masalah dibuat untuk mengenali serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana program kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) wilayah perbatasan Sebatik Indonesia-Malaysia?
- 2) Bagaimana dinamika perdagangan wilayah perbatasan Sebatik Indonesia-Malaysia?

- 3) Bagaimana regulasi terhadap transaksi perdagangan lintas batas di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia di pulau Sebatik?
- 4) Apa peluang dan tantangan upaya kerjasama Indonesia-Malaysia melalui Sosek Malindo wilayah perbatasan Sebatik Indonesia-Malaysia?

### **1.2.1. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah penelitian dengan menitikberatkan pada regulasi terhadap transaksi perdagangan lintas batas wilayah perbatasan oleh pemerintah.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan di teliti di dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

**“Bagaimana regulasi terhadap transaksi perdagangan lintas batas wilayah perbatasan Sebatik-Sabah?”**

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan mata uang Ringgit Malaysia akibat perdagangan tradisional yang

menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat perbatasan khususnya masyarakat Sebatik, dan mengetahui dampak apa sajakah yang di timbulkan akibat penggunaan mata uang Ringgit Malaysia perbatasan Sebatik Indonesia.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penulisan terhadap penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi tambahan bagi yang membutuhkan. Maka dari itu kegunaan atau manfaat penelitin ini sebagai berikut:

#### **a. Teoritis**

Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, di samping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut akan sulit dipahami, di sisi lain teori berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.<sup>10</sup>

Menurut B.N. Marbun, teori yaitu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pengaruh penggunaan mata uang Ringgit

---

<sup>10</sup> (Barbara, 1992)

<sup>11</sup> (Marbun, 2015)

Malaysia yang menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat perbatasan khususnya masyarakat Sebatik.

b. Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan pada pihak yang lain yang tertarik dan berminat untuk meneliti masalah penggunaan mata uang Ringgit Malaysia, menjadi tulisan yang bersifat komperatif bagi tulisan yang serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mengetahui, mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan penggunaan mata uang Ringgit Malaysia yang terjadi di Perbatasan Indonesia